ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Sengaja Mengedarkan Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No:87/Pid.B/2012/PN.Mbo)"** adalah hasil penelitian kualitatif berupa *library research* untuk menjawab pertanyaan yaitu Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam memutuskan perkara No. 87/Pid.B/2012/PN.Mbo tentang tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar menurut putusan No. 87/Pid.B/2012/PN.Mbo.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diporoleh dari kajian kepustakaan, yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan metode deskriptif, analisis dan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus menurut hukum pidana Islam.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa putusan yang ditetapkan hakim kepada terdakwa yang terbukti melanggar pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengancam hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Berdasarkan pertimbangan dalam hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yakni pidana selama 4 (empat) bulan penjara dari tuntutan awal jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman pidana 6 (enam) bulan penjara dan barang-barang bukti yang dimilikinya dirampas oleh negara untuk dimusnahkan. Meskipun hukuman yang diberikan jauh lebih ringan daripada hukuman yang ditetapkan undang-undang. Namun, hal ini disebabkan karena terdakwa tidak mengetahui secara menyeluruh kosmetik apa saja dan seperti apa yang tidak boleh dijual dan kurangnya informasi dari pengawas Dinas kesehatan Kabupaten Aceh Barat dan juga tidak ada penyuluhan dari Badan POM. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr* karena tidak ada ketentuan nash mengenai tindak pidana ini. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarīmah ta'zīr.* Melihat perbuatan yang dilakukan terdakwa dampak negatifnya dapat merusak kesehatan orang yang membelinya jika digunakan secara berkepanjangan bahkan bisa mengakibatkan kematian seharusnya dikenai *ta'zīr* yang berupa penjara yang mendekati 15 tahun yang sudah ada di dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diharapkan peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar bisa berkurang bahkan bisa dicegah dan kasus-kasus yang telah terjadi dapat segera terselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang kesehatan serta terciptanya kepastian hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id